



RENCANA STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH 2023 - 2026



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 telah dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra ini disusun secara simultan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi sehingga peran strategis tersebut diwujudkan dalam bentuk pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah oleh perangkat daerah. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah, pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah, penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan pemerintah daerah, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dan pelaporan perangkat daerah, penyelenggaraan urusan hukum, kerja sama daerah dan protokol, fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, kesejahteraan sosial dan mental spiritual serta tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Demikian Renstra ini disusun, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja di Lingkungan Sekretariat daerah di tahun 2023-2026

Jakarta, 8 April 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	7
a. Biro Pemerintahan	9
b. Biro Hukum	16
c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	17
d. Biro Kepala Daerah	18
e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	19
f. Biro Kerja Sama Daerah	20
g. Biro Perekonomian dan Keuangan	21
h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	22
i. Biro Kesejahteraan Sosial	24
j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	27
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.2.1. Sumber Daya Manusia	28
2.2.2. Aset Modal	32
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	42
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja	43
2.3.2. Realisasi Anggaran	64
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	119
1. Tantangan	119
2. Peluang	120

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DAN FUNGSI	BERDASARKAN TUGAS
3.1. Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah	121
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	128
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	136
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah	140
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Strategi dan Arah Kebijakan	142
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	145
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	160
BAB VIII PENUTUP	
Penutup	168

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Jumlah PNS di masing-masing Unit Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	28
TABEL II.2	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia..	30
TABEL II.3	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	31
TABEL II.4	Aset/Modal Sekretariat Daerah	33
TABEL II.5	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah.....	43
TABEL II.6	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah 2018-2021	45
TABEL II.7	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 2018-2022..	64
TABEL III.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penetuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	121
TABEL III.2	Telaah Tujuan, Sasaran dan Program Sekretariat Daerah	133
TABEL IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	140
TABEL V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	142
TABEL VI.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah	147
TABEL VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	161
GRAFIK II.1	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia....	28
GRAFIK II.2	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	30
GAMBAR 1.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah ...	2
GAMBAR 3.1	Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) digunakan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama periode empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat mengakomodir

kebutuhan dan perkembangan di masa depan di lingkungan Sekretariat Daerah pada khususnya dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya.

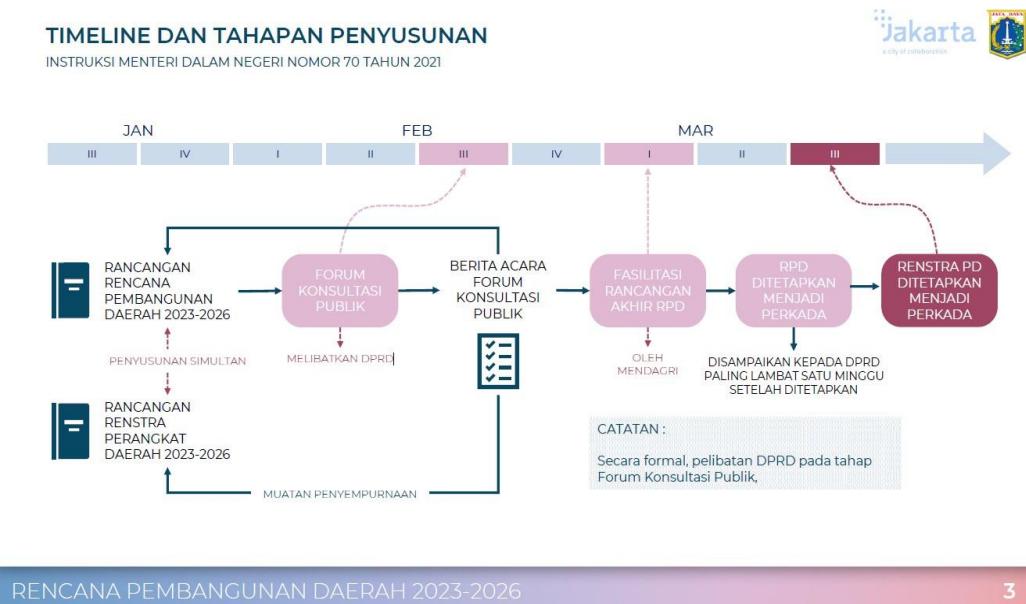
Sekretariat Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 10 (sepuluh) Biro sebagai Unit Perangkat Daerah (UKPD). Selama empat tahun ke depan Sekretariat Daerah juga akan menjalankan peran dan fungsi untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di DKI Jakarta.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan beberapa tahap yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
2. Penyusunan rancangan Renstra Sekretariat Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Sekretariat Daerah;
4. Penetapan Renstra Sekretariat Daerah.

Gambar 1.1

Bagan Alur penyusunan Renstra Sekretariat Daerah



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Periode 2023-2026 maka diharapkan seluruh entitas di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
17. Surat Edaran Gubernur Nomor 3/SE/2012 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Renstra Sekretariat Daerah adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah
4. Sebagai bentuk kontrak kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: Sumber Daya Perangkat Daerah (SDM dan Aset/Modal), Kinerja Sekretariat Daerah (Capaian IK dan Realisasi Anggaran) dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Terpilih,Telaahan Renstra K/Ldan Renstra,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB IV** Tujuan dan Sasaran mencakup: Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.
- BAB V** Strategi dan Arah Kebijakan mencakup : Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, bab ini menyajikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah.
- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan mencakup : Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusanmencakup : Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditatanya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mengatur :

Kedudukan : Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif.

- Fungsi : a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;
- b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
- c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
- i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan

- Biro Pemerintahan;
 - Biro Hukum;
 - Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - Biro Kepala Daerah; dan
 - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Biro Perekonomian dan Keuangan; dan
 - Biro Kerja Sama Daerah.
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat
- Biro Kesejahteraan Sosial; dan
 - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Adapun tugas dan fungsi pada masing-masing Biro yaitu :

a. Biro Pemerintahan

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah, serta bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan.

Biro Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

3. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
4. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintahan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
9. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
10. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas

- pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, perangkat kewilayahan dan pengaduan;
11. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;
 12. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 13. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir masa jabatan;
 14. fasilitasi pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi;
 16. fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi pemerintah, antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
 17. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pemerintahan;
 18. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Pemerintahan;
 19. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan; dan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan.

Kelompok Substansi

1 Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah serta pengelolaan kesekretariatan Biro Pemerintahan.

Kelompok Substansi Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah, dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah;

- vi. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori serah terima jabatan Gubernur dan akhir masa jabatan;
- vii. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- viii. pelaksanaan fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi pemerintah, antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia;
- ix. pengelolaan kesekretariatan Biro Pemerintahan; dan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro

2 Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam administrasi dan perangkat kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum.

Kelompok Substansi Kewilayahan dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;

- ii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
- v. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan umum;
- v. pengoordinasian pelaksana tugas perangkat kewilayahan Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi di wilayahnya;
- vi. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro

3 Kelompok Substansi Tata Praja

Kelompok Substansi Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan : ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah.

Kelompok Substansi Tata Praja menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;

- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
- iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
- iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik;
- v. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesekretariatan dewan perwakilan rakyat daerah;
- vi. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi; dan
- vii. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

4 Kelompok Substansi Pengaduan

Kelompok Substansi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan.

Kelompok Substansi Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- i. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- ii. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- iii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- iv. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan;
- v. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan pengaduan di lingkungan Balaikota;
- vi. pengoordinasian dan pengelolaan kanal pengaduan resmi daerah;
- vii. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik itu kewenangan pemerintah pusat maupun swasta;
- viii. pengoordinasian dan penyusunan laporan penanganan pengaduan;

pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

b. Biro Hukum

Tugas dan fungsi

Melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, pelayanan hukum bantuan hukum, publikasi dan dokumentasi hukum dan pembinaan hak asasi manusia , penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian pengharmonisasian, pemantapan, pembulatan, konsepsi rancangan produk hukum daerah,

dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan hukum, pengoordinasian dan pelaksanaan bantuan hukum.

Eselon III

1 Bagian Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, pengoordinasian, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah dan evaluasi dan pengkajian produk hukum daerah.

2 Bagian Pelayanan Hukum

Pelaksanaan pengoordinasian, pelayanan dan pengkajian perkara non litigasi.

3 Bagian Bantuan Hukum

Pengoordinasian, pengkajian dan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi.

4 Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan Dokumentasi Hukum

Pengordinasian pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dokumentasi, publikasi, sosialisasi, pengelolaan kearsipan produk hukum daerah, pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan hak asasi manusia serta kesekretariatan Biro Hukum.

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Eselon III

1 Bagian Kelembagaan

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang kelembagaan PD/UKPD.

2 Bagian Analisis Jabatan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan PD/UKPD.

3 Bagian Tatalaksana

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang ketatalaksanaan PD/UKPD, antara lain sistem dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang kerja, tata naskah dinas serta pengaturan pakaian dinas, serta pengelolaan kesekretariatan Biro.

4 Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

d. Biro Kepala Daerah

Tugas dan fungsi

Melaksanakan administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengetikan dan penaklikan naskah dinas pimpinan.

Eselon III

1 Bagian Administrasi Kepala Daerah

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan

pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah Daerah.

2 Bagian Protokol

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keprotokolam dan acara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

3 Bagian Persidangan

Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; pengoordinasian dan penyusunan naskah sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta pengoordinasian penyiapan dan pelaksanaan jamuan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

4 Bagian Naskah Dinas

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengetikan, penaklikan, penomoran dan kearsipan naskah dinas Gubernur, meliputi Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur dan pengelolaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah.

e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

Tugas dan fungsi

Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengkapan dan sarana acara, administrasi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur dan ketatausahaan Sekretariat Daerah

Eselon III

1 Bagian Rumah Tangga

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan rumah tangga kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan.

2 Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan

Melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan penggunaan kompleks gedung Balaikota dan pengelolaan perlengkapan dan sarana acara seremonial.

3 Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur

Melaksanakan pengelolaan administrasi Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur; pengelolaan administrasi umum Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

4 Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan anggaran, keuangan dan aset Sekretariat Daerah.

f. Biro Kerja Sama Daerah

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah baik Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik, Kerja Sama Luar Negeri, Kerja Sama Pihak Ketiga dan perjalanan dinas.

Eselon III

1 Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitasi Korps Diplomatik

Melaksanakan penyusunan analisis pertimbangan, monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah Dalam Negeri dan Lembaga Negara dan penyelenggaraan pelayanan terhadap Korps Diplomatik.

2 Bagian Kerja Sama Luar Negeri

Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan, monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama terhadap Pemerintah Daerah Luar Negeri, Organisasi Internasional dan lembaga di luar negeri.

3 Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga

Melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan, monitoring dan evaluasi terhadap usulan kerja sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan hukum.

4 Bagian Perjalanan Dinas

Mengordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perjalanan dinas dan pengelolaan kesekretariatan Biro Kerja Sama Daerah.

g. Biro Perekonomian dan Keuangan

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi, penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, dan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Eselon III

1 Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan

urusan pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah.

2 Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan), penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

3 Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi daerah (mikro dan makro) dan pengelolaan kesekretariatan Biro Perekonomian dan Keuangan.

4 Bagian Keuangan Daerah

Memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air

minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, jasa konstruksi, permukiman, persampahan), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.

Eselon III

1 Bagian Pekerjaan Umum

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, drainase), energi dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi.

2 Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan permukiman), perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan penyelenggaraan penataan kawasan.

3 Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan air limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan

pertamanan dan pemakaman dan bidang mitigasi adaptasi bencana iklim.

4 Bagian Pembangunan Kota

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum, penyelesaian pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa konstruksi) serta pengelolaan kesekretariatan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

i. Biro Kesejahteraan Sosial

Tugas dan fungsi

Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga.

Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga;
- g. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kesejahteraan Sosial;
- h. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kesejahteraan Sosial
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Kesejahteraan Rakyat

1. Koordinator Kelompok Substansi Kesehatan

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraaan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan

- 5) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro
2. Koordinator Kelompok Substansi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
Menyelenggarakan Fungsi :
 1. Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;
 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga;
 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kepemudaan dan olahraga; dan
 5. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro
3. Koordinator Kelompok Substansi pemberdayaan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
Menyelenggarakan Fungsi :
 1. Pengoordinasikan, perumusan, dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

- pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk; dan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Biro

j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Tugas dan fungsi

Mongoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan dan karsipan serta bidang mental spiritual

Eselon III

1 Bagian Pendidikan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

2 Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Karsipan

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, perpustakaan dan karsipan, pelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

3 Bagian Mental Spiritual

Melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan mental spiritual.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas tersebut Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung yang terdiri dari :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut didukung dengan jumlah personil Pegawai Negeri Sipil dan non PNS adapun masing-masing data berdasarkan usia pegawai, tingkat pendidikan dan distribusi masing-masing unit perangkat daerah.

Tabel II.1
Jumlah PNS di masing-masing Unit Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah

PD	NAMA BIRO	PNS	NON PNS	KETERANGAN
	Sekretariat Daerah	659	480	
	Sekretaris Daerah	1		
	Asisten			
	1. Asisten Pemerintahan	1		
	➤ Biro Pemerintahan	38	-	4 Kelompok Substansi, 10 Kelompok Sub Substansi dan 2 Subbagian
	➤ Biro Hukum	59	3	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	45	-	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Kepala Daerah	114	14	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	147	456	4 Bagian dan 12 Subbagian

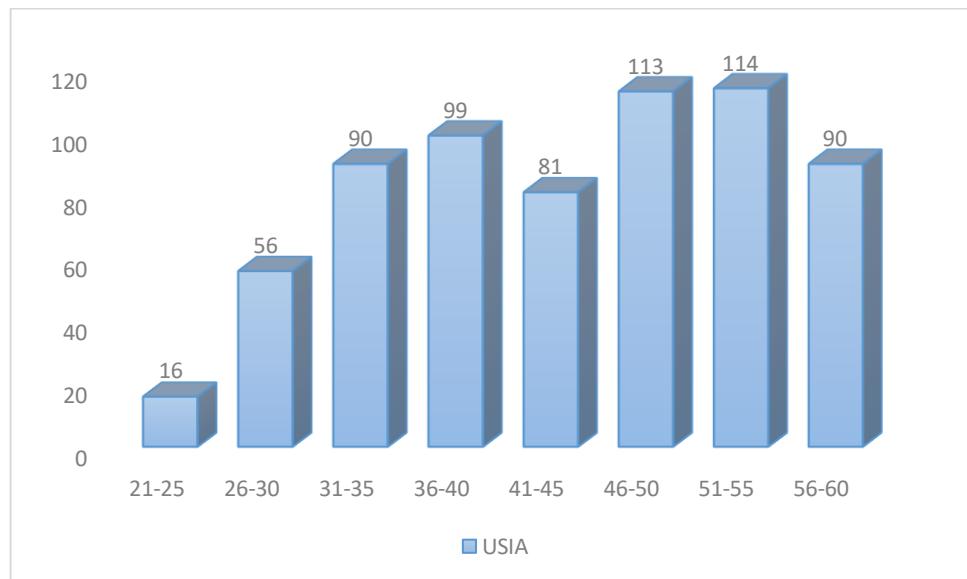
PD	NAMA BIRO	PNS	NON PNS	KETERANGAN
	2. Asisten Perekonomian dan Keuangan	1		
	➤ Biro Perekonomian dan Keuangan	48	-	4 Bagian dan 12 Subbagian
	➤ Biro Kerja Sama Daerah	54	4	4 Bagian dan 4 Subbagian dan 8 Sub Koordinator
	3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1		
	➤ Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	52	3	4 Bagian dan 12 Subbagian
	4. Asisten Kesejahteraan Rakyat	1		
	➤ Biro Kesejahteraan Sosial	30	-	3 Koordinator, 8 Sub Koordinator dan 1 Subbag TU
	➤ Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	43	-	3 Bagian dan 9 Subbagian

*Data pegawai per 31 Desember 2021

Tabel II.2
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia

No	Nama Biro	U S I A							
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
1	Biro Pemerintahan	4	5	10	3	2	6	4	2
2	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1	6	8	7	7	7	7	2
3	Biro Hukum	0	4	18	11	10	7	7	2
4	Biro Kepala Daerah	6	29	11	26	6	13	13	11
5	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	9	12	8	19	22	32	26	19
6	Biro Kerjasama Daerah	4	6	7	13	8	5	7	5
7	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	0	0	14	10	9	8	5	3
8	Biro Perekonomian dan keuangan	3	6	6	8	2	10	9	5
9	Biro Kesejahteraan Sosial	0	2	7	5	0	4	7	5
10	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	0	1	5	7	12	11	6
Jumlah Pegawai		27	70	90	107	73	104	96	60

Grafik II.1
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Usia

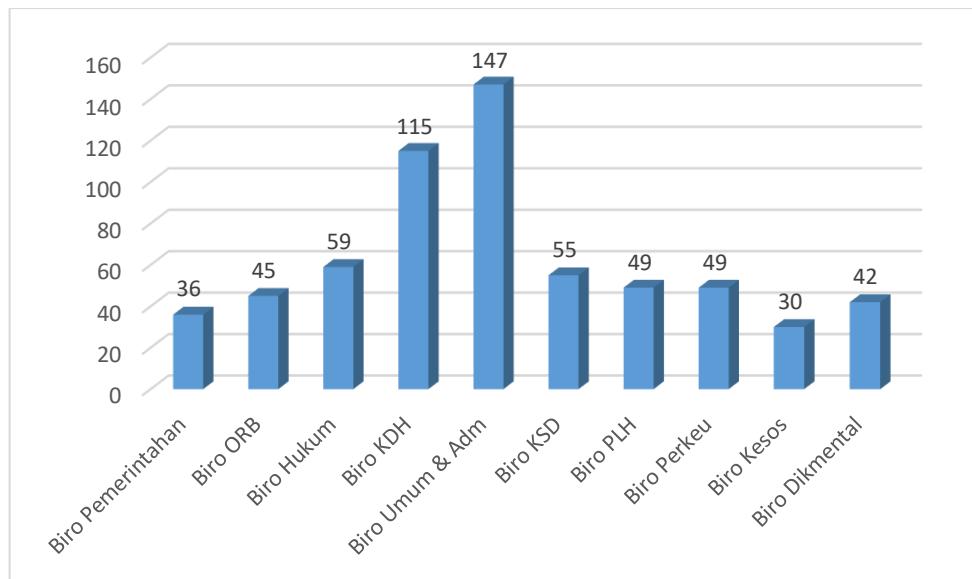


Tabel II.3
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Biro	P E N D I D I K A N						
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4 / SI	S2	S3
1	Biro Pemerintahan	0	5	2	0	18	11	0
2	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	0	0	1	4	30	10	0
3	Biro Hukum	0	0	2	1	42	13	1
4	Biro Kepala Daerah	0	4	26	14	62	9	0
5	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	0	2	65	13	58	11	0
6	Biro Kerjasama Daerah	0	0	7	4	4	23	17
7	Biro Pembangunan dan	0	0	3	3	22	21	0

No	Nama Biro	P E N D I D I K A N						
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4 / SI	S2	S3
	Lingkungan Hidup							
8	Biro Perekonomian dan keuangan	0	0	9	10	15	15	0
9	Biro Kesejahteraan Sosial	0	1	3	2	18	5	1
10	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	0	0	10	3	22	7	0
Jumlah Pegawai		0	12	128	54	291	125	19

Grafik II.2
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan



2.2.2. Aset/Modal

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai aset sebesar Rp.1.166.067.042.198,00 untuk aset tetap dan Rp.1.451.816.037,00 untuk aset lain-lain yang didistribusi ke masing-masing unit perangkat daerah yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.4
Aset/Modal Sekretariat Daerah

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Aset Tetap	1.166.067.042.193	
	Aset Lain- lain	1.451.816.037	
BIRO PEMERINTAHAN			
I	ASET TETAP	(437.308.943)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.226.352.562	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.630.004.689)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.630.004.689)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	596.347.873	
II	ASET LAINNYA	9.960.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	193.552.282	
	Aset Tetap - Rusak Berat	129.095.382	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	64.456.900	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(190.232.282)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(125.775.382)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(64.456.900)	
	Jumlah Aset Lainnya	3.320.000	
BIRO HUKUM			
I	ASET TETAP	(599.866.382)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.486.351.378	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	97.474.275	
	Konstruksi Dalam Penggeraan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.922.505.896)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.922.505.896)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	661.319.757	
II	ASET LAINNYA	2.700.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	77.235.375	
	Aset Tetap - Rusak Berat	77.235.375	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(76.335.375)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(76.335.375)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	900.000	
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI			
I	ASET TETAP	(3.132.568.747)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	4.122.279.414	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	167.354.353	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.903.945.427)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.742.321.074)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(161.624.353)	
	Jumlah Aset Tetap	385.688.340	
II	ASET LAINNYA	0	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	75.369.450	
	Aset Tetap - Rusak Berat	75.369.450	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(75.369.450)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(75.369.450)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
BIRO KEPALA DAERAH			
I	ASET TETAP	(6.106.663.494)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	16.966.586.545	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	175.796.555	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.624.523.297)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.624.523.297)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	5.517.859.803	
II	ASET LAINNYA	62.336.100	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	680.189.284	
	Aset Tetap - Rusak Berat	361.587.490	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	318.601.794	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(659.410.584)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(340.808.790)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(318.601.794)	
	Jumlah Aset Lainnya	20.778.700	
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH			
I	ASET TETAP	1.182.340.227.603	
	Tanah	468.512.780.000	
	Peralatan dan Mesin	80.099.585.114	
	Gedung dan Bangunan	695.886.616.548	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.268.530.332	
	Aset Tetap Lainnya	125.596.240	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(443.148.662.955)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(69.045.647.241)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(369.998.653.150)	
	Akumulasi Penyusutan	(3.978.766.324)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(125.596.240)	
	Jumlah Aset Tetap	812.744.445.279	
II	ASET LAINNYA	1.339.406.517	
	Aset Tidak Berwujud	58.419.278	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	58.419.278	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(58.419.278)	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(58.419.278)	
	Aset Lain-lain	46.778.395.063	
	Aset Tetap - Rusak Berat	45.927.726.619	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	850.668.444	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(46.331.926.224)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(45.482.449.415)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(849.476.809)	
	Jumlah Aset Lainnya	446.468.839	

BIRO KERJASAMA DAERAH

I	ASET TETAP	(1.990.744.784)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	3.195.441.206	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.793.875.732)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.793.875.732)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	401.565.474	
II	ASET LAINNYA	9.634.800	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	62.097.000	
	Aset Tetap - Rusak Berat	62.097.000	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(58.885.400)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(58.885.400)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	3.211.600	
BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN			
I	ASET TETAP	(587.603.967)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.081.967.195	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.583.846.119)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.583.846.119)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	498.121.076	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
II	ASET LAINNYA	7.938.906	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	135.251.242	
	Aset Tetap - Rusak Berat	135.251.242	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(132.604.940)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(132.604.940)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	2.646.302	
BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
I	ASET TETAP	(1.593.788.967)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.118.568.248	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	60.412.152	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.983.916.589)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.963.200.249)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.716.340)	
	Jumlah Aset Tetap	195.063.811	
II	ASET LAINNYA	27.478.620	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	460.688.210	
	Aset Tetap - Rusak Berat	460.688.210	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(451.528.670)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(451.528.670)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	9.159.540	

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

I	ASET TETAP	(597.467.513)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	1.621.439.813	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.280.115.713)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.280.115.713)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	341.324.100	
II	ASET LAINNYA	0	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Aset Lain-lain	68.055.214	
	Aset Tetap - Rusak Berat	68.055.214	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(68.055.214)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(68.055.214)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL			
I	ASET TETAP	(1.227.172.613)	
	Tanah	-	
	Peralatan dan Mesin	2.419.308.113	
	Gedung dan Bangunan	-	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	
	Aset Tetap Lainnya	-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.021.929.613)	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.021.929.613)	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
	Akumulasi Penyusutan	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	
	Jumlah Aset Tetap	397.378.500	
II	ASET LAINNYA	300.000	
	Aset Tidak Berwujud	-	
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	
	Aset Lain-lain	109.348.756	
	Aset Tetap - Rusak Berat	109.348.756	
	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(109.248.756)	

No	Rekening	Saldo Per 31 Desember 2021	Ket
	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(109.248.756)	
	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	
	Jumlah Aset Lainnya	100.000	

*Sumber : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021
(Unreview)

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam subbab ini Sekretariat Daerah menjelaskan kondisi eksisting dan tahun-tahun sebelumnya mengenai data capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Tabel II.5

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2018-2022 dijabarkan pada tabel 2.3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022	Kondisi Akhir	PD Pengampu
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0,00	80,00	83,76	83,00	84,41	86	86,34	88	88,44	88,5	88,5	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
			Skor EKPPD	Nilai	3,056	3,100	3,1045	3,150	3,1712	3,2	3,2374	3,25	DBR	3,3	3,3	BIRO TATA PEMERINTAHAN BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		2022	Kondisi Akhir	PD Pengampu
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
																HIDUP BIRO ADMINISTRASI SETDA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL BIRO PEREKONOMIAN
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75 69,47	68,00	70,92	73,00	74,57	78	76,54	85	78,88	91	91	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

TABEL II.6
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2018-2021

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
1	BIRO ADMINISTRASI SETDA	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	0	kasus	1	0	100%	1	0	100%	1			1			Tahun 2020, Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa tidak digunakan pada Biro Perkeu.

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
2	BIRO ADMINISTRASI SETDA	BIRO PEREKONO MIAN DAN KEUANGAN	Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	0	kasus	1	0	100%	1	0	100%	0			0			Tahun 2020, Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa tidak digunakan pada Biro Perkeu.
3	BIRO ADMINISTRASI SETDA	BIRO KERJASAMA DAERAH	Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas	3	indeks	3	3,71	100%	3	3,75	100%	4	4	100%	4	4	100%	
4	BIRO PEREKONO MIAN	BIRO PEREKONO MIAN DAN KEUANGAN	Program Koordinasi kebijakan perekonomian	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	0	kasus	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
5	BIRO PEREKONO MIAN	BIRO PEREKONO MIAN DAN KEUANGAN	Program Koordinasi kebijakan perekonomian	Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan	0	kasus	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	
6	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil	0	%	75	100	100%	0			0			0			
7	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KERJASAMA DAERAH	Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri	Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil	0	%	0			80	100	100%	85	85	100%	85	85	100%	
8	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KEPALA DAERAH	Program Keprotokolalan dan Administrasi Pimpinan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah	0	Skala (1-4)	0			3,2	3,95	100%	3,5	4	100%	3,5	4	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
9	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KEPALA DAERAH	Program Keprotokolahan dan Administrasi Pimpinan Daerah	Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah	0	Skala (1-4)	3,2	3,45	100%	0			0			0			
10	BIRO ADMINISTRASI SETDA	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	3	75%	4	4	100%	
11	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
12	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	3	75%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
13	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraaan Sosial	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	Indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
14	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KEPALA DAERAH	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
15	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
16	BIRO UMUM	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIA T DAERAH	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	4	100%	4	3	75%	4	4	100%	4	4	100%	
17	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	indeks kepuasan pelayanan kantor	3	Indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
18	BIRO TATA PEMERINTAHAN	BIRO PEMERINTAHAN	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan	indeks kepuasan pelayanan kantor	4	indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
19	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	indeks kepuasan pelayanan kantor	0	Indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	3,95	98,75 %	4	3,97	99,25	
20	BIRO ADMINISTRASI SETDA	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIA T DAERAH	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	2	indeks	4	4	100%	4	4	100%	4	3	75%	4	4	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
23	BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	BIRO KEPALA DAERAH	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	3	Indeks	4	4	100%	4	3	75%	4	4	100%	4	4	100%	
25	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual	Jumlah Ketidaksesuaian Antara Kebijakan Dengan Peraturan	2	Kebijakan	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
26	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual	Jumlah Ketidaksesuaian antara Peraturan dengan Pelaksanaan	0	Kebijakan	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
27	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah ketidak sesuaian antara kebijakan dengan peraturan	0	kebijakan	0	0	100%	0	32	0%	0	45	0%	0	0	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
28	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan	0	persen	0	0	100%	0	52	0%	0	72	0%	0	0	100%	
29	BIRO TATA PEMERINTAHAN	BIRO PEMERINTAHAN	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Skor EKPPD	3,056	Skor	0			3,15	3,17	100%	3,2	3,23	100%	3,25			Data Capaian 2021 Belum Rilis

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
30	BIRO TATA PEMERINTA HAN	BIRO PEMERINTA HAN	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peringkat LPPD	4	Peringkat	4	4	100%	0			0			0			
31	BIRO TATA PEMERINTA HAN	BIRO KERJASAMA DAERAH	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Kerjasama yang difasilitasi dan berhasil	100	%	0			100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
32	BIRO TATA PEMERINTA HAN	BIRO PEMERINTA HAN	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan dan berhasil	100	%	10 0	100	100%	0			0			0			
33	BIRO TATA PEMERINTA HAN	BIRO PEMERINTA HAN	Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian masalah pemerintahan	100	%	10 0	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	85	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
34	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	0	%	40	40	100%	50	50	100%	60	79,16	100%	70	83	100%	
35	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	0	%	5	6,39	100%	10	14,21	100%	15	17,54	100%	20	4	100%	
36	BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup	Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang	0	Persentase	40	40	100%	0			0			0			

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
37	BIRO UMUM	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIA T DAERAH	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Keruماhtangan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keruماhtangan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	3,65	Indeks (Skala 1,00-4,00)	0			3,67	3,86	100%	3,7	3,9	100%	3,72	4	100%	
38	BIRO UMUM	BIRO UMUM	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Keruماhtangan Daerah	Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Keruماhtangan Daerah	0	Persen	46, 83	78,01	100%	0			0			0			

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
39	BIRO UMUM	BIRO UMUM	Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Keruamah tanggaan Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Keruamah tanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan	3,62	Indeks (Skala 1,00-4,00)	3,65	3,81	100%	0			0			0			
42	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	63,75	(Skala 1 - 100)	0			73	74,57	100%	78	76,54	98,13 %	85	78,88	92,80 %	
43	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	63,75	(Skala 1 - 100)	68	68	100%	0			0			0			

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
44	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	0	(Skala 1 - 4)	80	83,76	100%	0			0			0			
45	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Regulasi yang Harmonis	99	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	
46	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara	70	%	0			85	100	100%	85	100	100%	90	100	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
47	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	70	%	0			85	100	100%	85	100	100%	90	100	100%	
48	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	56	%	0			75	87	100%	88	100	100%	94	100	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
49	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	Persentase Penanganan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara di Pengadilan	70	%	80	100	100%	0			0			0			
50	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara	Kesadaran Hukum Masyarakat	56	%	64	64	64%	0			0			0			
51	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	(Skala 1 - 4)	0			83	84,41	100%	86	86,34	100%	88	88,42	100%	

NO	PERANGKAT DAERAH (RPJMD 2017-2022)	PERANGKAT DAERAH (PASCA REVISI OTK SEKDA)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KONDISI AWAL	2018			2019			2020			2021			KETERANGAN
							Target	Capaian	%										
52	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITAL	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITAL	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Mental Spiritual	0	%	0			82	91,75	100%	85	91,23	100%	87	86	98,85 %	
53	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITAL	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITAL	Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual	Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah	0	%	80	90	100%	0			0			0			

2.3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah pada periode Tahun 2017-2022, terdapat pada tabel 2.3.2.

Pada data realisasi anggaran terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Pergub 150 Tahun 2019 maka dalam penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah terdapat perubahan pada tahun 2020. Adapun rincian penyerapan anggaran pada setiap Biro berdasarkan Program Kegiatan.

Tabel II.7
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 2018- 2022

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
BIRO TATA PEMERINTAHAN												
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH		2.272.793.526				2.120.470.962				93%		
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH	368.610.066	1.814.889.603			368.593.088	1.597.221.049			100%	88%		
PROGRAM PENGUATAN	117.900.000	128.350.000			117.841.500	124.443.750			100%	97%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
AKUNTABILITAS KINERJA												
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO TATA PEMERINTAHAN	711.263.059	641.052.068			608.890.483	538.413.377			86%	84%		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/BADAN	3.021.405.595				2.740.695.260				91%			
BIRO PEMERINTAHAN												
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH			284.745.500					262.045.500			92%	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				2.661.162.105				2.580.379.317			97%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			14.922.100				14.922.100				100%	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO TATA PEMERINTAHAN			142.057.471				132.592.632				93%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				545.977.738				480.012.470				88%
BIRO HUKUM												
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				1.008.639.374				874.896.868				87%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				78.600.000				74.000.000				94%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENATAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	199.350.000	443.300.000	20.000.000		180.130.000	420.844.000	20.000.000		90%	95%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI				10.000.000				10.000.000				100%
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN - KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PENANGANAN PERKARA	3.791.174.169	4.798.040.539			3.163.017.737	4.101.138.739			83%	85%		
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN & KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA PENANGANAN PERKARA			1.135.281.399				1.132.297.703				100%	

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO HUKUM	812.725.758	1.321.582.081	341.460.700		703.143.248	1.162.581.786	341.312.900		87%	88%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				234.366.200				227.313.200				97%
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI												
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSAN AAN DAN JABATAN APARATUR		1.649.398.297	670.985.000			1.473.605.250	665.985.000			89%	99%	
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSAN AAN DAN SDM APARATUR	533.109.500				510.984.500				96%			

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				345.300.000				345.300.000				100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	525.046.047	473.126.777	138.293.073		496.717.525	452.027.500	126.837.955		95%	96%	92%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		109.320.800	6.085.000			86.095.000	6.085.000		79%	100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				131.905.507				103.437.750				78%
BIRO KEPALA DAERAH												
PROGRAM KEPROTOKOLAN DAN ADMINISTRASI			5.725.491.661					5.113.146.205				89%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PIMPINAN DAERAH												
PROGRAM PENGELOLAAN KENDARAAN OPERASIONAL BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI			944.859.751				935.275.847				99%	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI			869.308.951				748.208.439				86%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.488.672.160				9.152.641.809				96%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI												
PROGRAM KEPROTOKOLAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAERAH	14.530.968.476	14.491.101.561			12.700.313.831	12.474.061.036			87%	86%		
PROGRAM PENGELOLAAN KENDARAAN OPERASIONAL BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	1.071.697.100	839.397.373			929.460.061	622.463.692			87%	74%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	1.732.847.011	1.468.101.543			1.353.968.561	1.201.799.748			78%	82%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI	505.484.500	881.923.700			407.896.478	658.372.379			81%	75%		
BIRO ADMINISTRASI SETDA												
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PERATURAN BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN RETRIBUSI, ASET DAERAH DAN PENGADAAN BARANG JASA		260.266.598				240.142.000				92%		
PROGRAM PENGELOLAAN KENDARAAN OPERASIONAL BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	1.432.814.166	1.249.484.737			793.364.573	941.550.675			55%	75%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERJALANAN DINAS	54.585.470.000	105.853.126.500			54.351.423.410	82.670.548.058			100%	78%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	32.910.473.051	35.025.873.897			27.350.472.442	31.352.652.370			83%	90%		
BIRO UMUM												
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERUMAH TANGGAAN DAERAH	30.094.753.802	50.780.236.372			26.672.427.117	44.685.290.656			89%	88%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO UMUM	21.489.060.602	15.945.431.517			18.485.603.661	13.497.236.743			86%	85%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERUMAH TANG GAAN DAERAH			40.103.115.575					38.817.982.382				97%
PROGRAM PENGELOLAAN KENDARAAN OPERASIONAL BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH			1.207.107.977					668.292.575				55%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH			3.552.605.441					2.257.772.492				64%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN			27.168.233.522					23.574.489.634				87%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
KANTOR BIRO UMUM												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				772.585.809.867				757.389.212.306				98%
BIRO KERJASAMA DAERAH												
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH			145.750.000					121.038.000				83%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				362.804.188				338.295.787				93%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.455.428.000				3.206.465.265				93%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERJALANAN DINAS			18.000.984.000				1.828.612.720				10%	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI			635.048.535				505.150.986				80%	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI			322.491.700				298.809.919				93%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				519.698.756				404.681.319				78%
BIRO PEREKONOMIAN												

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	365.000.000	1.155.417.600			355.692.692	1.124.021.357			97%	97%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO PEREKONOMIAN	950.283.244	1.306.336.462			845.732.357	1.171.013.015			89%	90%		
BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN												
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN			5.600.000					5.600.000				100%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO PEREKONOMIAN			265.428.178					260.794.654				98%
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				-					-			

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				215.010.584				187.264.700				87%
BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM KOORDINASI PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	113.099.500	217.317.400			110.139.060	197.960.000			97%	91%		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.029.092.823	1.203.156.910			969.887.905	1.116.301.139			94%	93%		
BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM KOORDINASI PENATAAN KOTA DAN			57.525.000					23.925.000				42%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP			580.641.806				506.708.318				87%	
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.776.713.226				1.776.413.226				100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				440.112.824				409.924.593				93%
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL												

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.200.000				4.200.000				100%
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN KESEHATAN, SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	356.920.000	576.625.000			355.832.000	511.205.000			100%	89%		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				165.800.000				165.800.000				100%

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	420.987.285	472.599.041	54.496.415		369.003.825	407.796.895	53.616.835		88%	86%	98%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				62.366.100				50.344.700				81%
BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL												
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				232.945.224.189				227.921.433.589				98%
PROGRAM KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, SERTA MENTAL SPIRITUAL	324.115.000	220.550.000			297.676.500	189.410.000			92%	86%		

NAMA PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%) PADA TAHUN			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	7.815.475.964				7.639.617.736				98%			
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KANTOR BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	287.720.251	498.659.105	57.644.480		278.280.313	447.380.705	49.298.725		97%	90%	86%	
PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN MENTAL SPIRITUAL		8.369.882.954	28.620.000			8.286.487.854	28.620.000			99%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				67.524.055				54.370.985				81%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam merumuskan rencana strategi Sekretariat Daerah perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan semakin kompleks di masa depan. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah dalam hal ini khususnya Sekretariat Daerah menuntut adanya peningkatan peran, kewenangan dan koordinasi dalam menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain adalah:

1. Tantangan

a. Pandemi COVID

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk DKI Jakarta sangat banyak mempengaruhi pola hidup dan pola berfikir masyarakat pada berbagai bidang. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai dan pelayanan di semua lini. Untuk menghadapi masalah tersebut maka Sekretariat Daerah membuat transformasi digital di segala aspek agar pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik dan bisa mengakomodir kebutuhan pegawai pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

b. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang cukup luas, meliputi pengoordinasian seluruh SKPD dibawah koordinasi biro-biro sesuai pembidangan Asisten Sekda maka dalam hal ini Sekretariat Daerah yang terdiri dari sepuluh biro meningkatkan koordinasi dengan mengoptimalkan perangkat infomasi dan komunikasi.

- c. Sekretariat Daerah harus dapat bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dengan membangun Tim dan Kemitraan yang efektif sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kerja oleh setiap UKPD di Sekretariat Daerah sesuai pembidangan Asisten Sekda.

2. Peluang (Opportunity)

- a. Sekretariat Daerah merupakan potret dari Pemerintah Provinsi DKI dalam menciptakan gagasan, pembaharuan untuk meningkatkan pelayanan melalui evaluasi pemecahan masalah.Komitmen Gubernur untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik sehingga Sekretariat memiliki kesempatan untuk memberikan contoh dalam melaksanakan pelayanan di berbagai sektor dengan mengikuti kemajuan jaman khususnya dalam bidang teknologi Informasi.
- b. Kesekretariat menjadi percontohan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dalam berbagai lini dalam hal ini Sekretariat Daerah menjadikan e-Office sebagai contoh dalam kegiatan administrasi Sekretariat Daerah, selain itu penggunaan akun.jakarta.go.id menjadikan contoh transparansi dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- c. Semangat pimpinan untuk mengadakan perubahan dalam hal ini Sekretaris Daerah beserta jajarannya menjadikan Teknologi Informasi sebagai media untuk mensosialisaiakan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur terpilih, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1	2	3	4
<i>Biro Pemerintahan</i>			
1	Harmonisasi Kebijakan	Inventarisasi Kebijakan	ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui /direvisi sesuai dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang cepat
2		Ketersediaan Data	<ul style="list-style-type: none">▪ Data Pemerintahan yang tersedia belum lengkap▪ Koordinasi dengan Perangkat Daerah internal Pemprov DKI Jakarta perlu ditingkatkan terkait data
3	Sumber Daya Manusia	Tidak terdapat daya dukung dari Personil yang ada dalam mencapai tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum adanya capaian kinerja pegawai yang terukur dalam mendukung capaian Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah▪ Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan
<i>Biro Hukum</i>			
	nihil	nihil	Nihil
<i>Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi</i>			

1	Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah belum optimal	SDM kurang, baik segi kualitas maupun kuantitas	
		Prasarana dan Sarana Kerja belum memadai	Belum semua SKPD memiliki Standar Peralatan Kerja Teknis
			Belum adanya pedoman terkait sarana dan prasarana PD/UPD
			Kurangnya koordinasi internal PD/UPD terkait pengadaan prasarana dan sarana kerja
			Perkembangan teknologi yang terlalu cepat
		Penataan kelembagaan masih berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan daerah	PD/UPD masih melaksanakan tugas fungsi berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan pergub OTK
<i>Biro Kepala Daerah</i>			
1	Meningkatnya frekuensi dan kompleksitas acara Pimpinan Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan jumlah tamu dan jamuan makan	Waktu yang terbatas dan lemahnya koordinasi terkait acara dan jumlah tamu
2	Meningkatnya jumlah surat masuk yang ditujukan kepada pimpinan daerah	Perlunya sistem yang andal dan terintegrasi ke seluruh SKPD/UKPD	Masih butuh pengembangan sistem yang ada guna mencapai pelayanan publik yang baik
3	Terdapatnya kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi	Lemahnya koordinasi antar fungsi terkait	Penguatan koordinasi
<i>Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah</i>			
1	Layanan Kerumahtanggaan (bangunan gedung, jaringan listrik, jaringan air dan telekomunikasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas sarana dan prasarana, perlengkapan dan pelayanan rumah tangga dalam kegiatan OPD sehingga mengalih tugaskan pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya aplikasi layanan 2. Waktu penyelesaian keluhan atas layanan kerumahtanggaan yang belum optimal

		<p>yang sebenarnya bisa dianggarkan sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Layanan yang beririsan dengan OPD lain (contohnya renovasi bangunan yang beririsan dengan dinas CKTRP) 3. Kurang kompetennya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kerumah tanggaan 4. Keluhan terhadap pelayanan kerumah tanggaan belum dapat ditangani secara realtime oleh petugas 5. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan (peralatan perawatan bangunan) 6. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan layanan kerumahtanggaan 7. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process Automation (building automation system) 	
2	Layanan Pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang kompetennya sumber daya manusia dalam melaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pelayanan prima petugas pengamanan

		<p>kegiatan pelayanan pengamanan</p> <p>2. Masih adanya pengunjung balaikota yang tidak tertib atau tidak mematuhi SOP keamanan</p> <p>3. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan keamanan</p> <p>4. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan layanan pengamanan</p> <p>5. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process Automation (smart security system)</p>	<p>2. Bagi Aparat polisi dan TNI yang bertugas di balaikota dan harus menitipkan peralatan senjata api, biro umum di subbag pengamanan belum dapat memfasilitasi safety box senjata api</p>
3	Layanan Perlengkapan Sarana Acara Pimpinan dan Pelayanan Balaikota	<p>1. Adanya persepsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas sarana dan prasarana acara pimpinan serta ruang kerja, sarana kerja dalam kegiatan OPD sehingga mengalih tugaskan pekerjaan yang sebenarnya bisa dianggarkan sendiri.</p> <p>2. Layanan yang beririsan dengan OPD lain (contohnya acara rutin OPD, fasilitas kerja di ruangan</p>	<p>1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana dalam menyediakan perlengkapan dan sarana acara pimpinan sesuai kebutuhan</p> <p>2. Waktu layanan tidak fleksibel akibat tidak tersedianya anggaran</p>

		<p>masing-masing OPD)</p> <p>3. Kurang kompetennya sumber daya sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perlengkapan sarana acara pimpinan dan pelayanan balaikota)</p> <p>4. Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan (peralatan sarana acara dan pelayanan ruangan)</p> <p>5. Masih belum terakomodirnya anggaran untuk kebutuhan perlengkapan, layanan sarana acara dan pelayanan ruangan</p> <p>6. Perlunya pengaplikasian konsep smart building dan Robotic Process Automation</p> <p>7. Permohonan Penjadwalan acara dan penggunaan perlengkapan acara yang bersamaan</p>	
4	Layanan Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Deputi Gubernur	<p>1. Belum terintegrasinya jadwal pimpinan</p> <p>2. Adanya persepsi bahwa Biro UAS adalah OPD yang menyediakan seluruh fasilitas</p>	<p>1. Waktu perbaik pada pimpinan singkat</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses administrasi</p>

		<p>sarana dan prasarana, perlengkapan, pengelolaan administrasi dalam kegiatan OPD, Surat perbal yang sering kali mendesak tenggat waktunya, Pengelolaan waktu yang belum efisien oleh pemaraf perbal, Pengantar perbal bukan ASN yang mengerti konsep perbal</p> <p>3. Adanya individu dari OPD yang belum menaati prosedur administrasi, Kurang kompetennya sumber daya personil</p> <p>4. Surat masuk yang diterima pada e-Office belum sepenuhnya diproses realtime oleh operator, Belum lengkap fitur statistik (laporan) di e-Office, Ketika input tembusan surat dalam sistem e-Office terjadi double inputan, Proses pencarian kata kunci surat pada e-office belum maksimal(harus menyertakan penulisan objek surat secara lengkap</p> <p>5. Lamanya update nama pejabat dalam database e-office</p>	
<i>Biro Kerja Sama Daerah</i>			

1	Sumber Daya Manusia	Kurang SDM serta pendidikan pegawai belum sesuai kebutuhan/ persyaratan	Belum ada penambahan personil/pegawai
<i>Biro Perekonomian dan Keuangan</i>			
1	Harmonisasi Kebijakan	Inventarisasi Kebijakan	Masih ada kebijakan yang tidak sesuai kondisi eksisting. Belum disesuaikan/di update/revisi dengan kondisi saat ini
2	Data	Ketersediaan Data	Data mikro ekonomi belum lengkap tersedia.
			Koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data
3	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM, Banyak yang masuk masa purna bhakti - Pendidikan Pegawai belum sesuai kebutuhan/ persyaratan 	Tidak ada rekrutmen dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan
<i>Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup</i>			
1	Sumber Daya Manusia	Kurangnya jumlah SDM	Terbatasnya jumlah kuota Anjab dan ABK
<i>Biro Kesejahteraan Sosial</i>			
1	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang SDM (Setiap tahun ada pegawai yg pensun) <p>Kurang peningkatan kompetensi Pegawai (Diklat Pegawai masih Kurang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan pegawai tidak sebanding dengan pegawai yang pensiun dan mutasi karena promosi jabatan. <p>Kurangnya diklat untuk seluruh pegawai.</p>
2	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Kerja belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Perlengkapan Sarana Kerja perlu di tambah Sarana computer sudah banyak yang rusak, perlu peremajaan sarana.
<i>Biro Pendidikan dan Mental Spiritual</i>			
1	Data	Ketersediaan Data	Belum memiliki Sistem berbasis digitalisasi layanan mental spiritual
2	Pembangunan mental spiritual	Peran tokoh agama	Penguatan peran tokoh agama dalam pembangunan mental spiritual
3	Pemberdayaan umat	Peran lembaga mental spiritual	Peran lembaga mental spiritual dan rumah ibadah untuk pemberdayaan umat
4	Membangun peradaban	Integrasi pendidikan dan kebudayaan	Integrasi pendidikan dan kebudayaan dalam membangun peradaban pada generasi muda yang berbudaya

5	Kebijakan	Fungsi koordinasi	Jataan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan
---	-----------	-------------------	---

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPD TAHUN 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, maka visi dan misi dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah:

Visi:

“Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”.

Misi:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenang, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3. memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai social budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.

5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi Satu : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah

difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

Misi Dua : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan social masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan social budaya.

Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan

generasi mendatang. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi Lima : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pemberian pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

Misi Enam : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta. Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat.
- ii) pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan

kewirausahaan berbasis teknologi

- iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi
- iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif
- v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan
- i) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Secara skematis rumusan misi dan fokus prioritas dapat dilihat pada Gambar 3.1. Visi dan Misi Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Adapun dalam misi tersebut, diatas dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan

mendukung pelaksanaan ke-3 misi yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya dari ke-5 misi tersebut, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran RPD provinsi DKI Jakarta disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.2
Telaah Tujuan, Sasaran dan Program Sekretariat Daerah

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
Biro Pemerintahan			
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum optimalnya Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Target capaian Skor EKPPD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-
Biro Hukum			
1	Program Penataan Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Masih kurangnya pemahaman mekanisme penyusunan produk hukum daerah dan substansi yang diusulkan ke Biro Hukum oleh perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaan harmonisasi membutuhkan waktu lebih.	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan sebagai tanggung jawab bersama antara para perangkat daerah secara efektif dengan penyusunan produk hukum daerah terpadu dan berakhir di Biro Hukum - Pelaksanaan FGD dan konsultasi dengan perangkat daerah /unit kerja - Pembangunan penyusunan produk hukum daerah berbasis elektronik - Penambahan kualitas dan kuantitas SDM
2	Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Serta Penanganan Perkara	Pembuktian dalam perkara aset di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta	Telah terbangunnya sistem Pendataan aset dan peningkatan koordinasi antara perangkat daerah
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
1	Program Penataan Organisasi	Kurangnya SDM sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal	Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan Anjab/ABK
		Belum terciptanya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis
Biro Kepala Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya frekuensi dan kompleksitas acara Pimpinan Daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas	Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
		Meningkatnya isu-isu global dan regional dalam rangka meningkatkan citra dan daya saing kota Jakarta	Reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengarah kepada efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya
			Pengalaman empirik yang sangat memadai
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya faktor eksternal yaitu dengan adanya pandemic C19 terdapat kegiatan yang dilakukan refocusing - faktor internal yaitu kurang SDM dikarenakan purna bakti namun tidak diimbangi dengan rekrutmen pegawai yang seimbang sehingga formasi dan beban kerja yang terus meningkat tidak proporsional dengan jumlah SDM yang terus berkurang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pula faktor eksternal yaitu banyaknya pekerjaan yang sudah mengimplementasikan berbagai system dalam pelaksanaannya sehingga memudahkan proses pengjerjaannya serta adanya koordinasi yang baik dengan UKPD di Lingkungan Setda) Factor Internal yaitu perencanaan anggaran yang semakin membaik serta koordinasi dan yang solid diantara PPTK di Lingkungan

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
		-	Biro Umum Setdaprov DKI Jakarta
Biro Kerja Sama Daerah			
1	Program Penataan Organisasi	Kurangnya SDM sehingga pelayanan dan kinerja tidak optimal	Penyesuaian kebutuhan pegawai dalam Anjab
		Masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada fasilitasi kolaborasi dan kerjasama daerah	Pemberian solusi dalam permasalahan yang ada pada Fasilitasi Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah
Biro Perekonomian dan Keuangan			
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kurangnya pengelolaan, fasilitasi dan koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan keuangan	Meningkatkan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Keuangan
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup			
1	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Kurangnya pengelolaan, fasilitasi dan koordinasi kebijakan bidang pembangunan dan lingkungan hidup	Peningkatan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Biro Kesejahteraan Sosial			
1	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kurangnya pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar bidang kesehatan dan bidang social	Melakukan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial
		Kurangnya pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Melakukan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual			
1	Program Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan urusan mental spiritual terbatas pada fasilitasi dan koordinasi - Sistem Informasi Mental Spiritual belum terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kolaborasi dengan lembaga mental spiritual <p>Transformasi Digital</p>

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pembinaan urusan pemerintahan umum dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

a. Biro Pemerintahan

- 1) Kewenangan Daerah melalui undang-undang yang mengatur Jakarta;
- 2) Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 3) Permasalahan tapal batas daerah;
- 4) Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
- 5) Kedudukan dan kelembagaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- 6) Menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat yang patuh hukum, menjaga ketertiban umum, ketentraman, dan penegakan hukum;
- 7) Memberikan jaminan hidup bagi warga Jakarta bebas dari ketakutan, pemaksaan, penindasan, ketidakadilan dan korban bencana alam atau buatan;
- 8) Menjunjung tinggi kehidupan demokrasi, berpendapat, terbuka peluang komunikasi yang luas dan menerima informasi yang benar;
- 9) Penegasan tugas dan fungsi, pola koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
- 10) Layanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam aplikasi Citizen Relation Management dilihat dari aspek kualitas tindak lanjut pengaduan oleh PD/UKPD dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber daya Lainnya
- 11) Layanan pengaduan masyarakat secara fisik / tatap muka

b. Biro Hukum

- 1) Deregulasi/penataan produk hukum daerah

c. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

- 1) Penataan Organisasi
- 2) Penataan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- 3) Nilai PMPRB

d. Biro Kepala Daerah

- 1) Peningkatan pelayanan keprotokolan dan administrasi pimpinan daerah
- 2) Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan tupoksi keprotokolan

e. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah

- 1) Peningkatan pelayanan kerumahtanggaan (bangunan gedung, jaringan listrik, jaringan air dan telekomunikasi)
- 2) Peningkatan pelayanan pengamanan dalam Komplek Gedung Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
- 3) Peningkatan pelayanan perlengkapan sarana acara Pimpinan dan pelayanan Balaikota di dalam dan di luar Komplek Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
- 4) Peningkatan pelayanan administrasi Sekretaris Daerah, Deputi, Asisten Sekda dan Asisten Deputi
- 5) Peningkatan pelayanan kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD/OPD

f. Biro Kerja Sama Daerah

- 1) Pemetaan potensi yang bisa dikerjasamakan baik dalam negeri, luar negeri dan pihak ketiga
- 2) Peningkatan Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas SKPD/UKPD
- 3) Penataan hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional

g. Biro Perekonomian dan Keuangan

- 1) Jak Lingko - Integrasi Sistem Transportasi;
- 2) Energi Listrik Alternatif (Solar Panel);

- 3) Ease of Doing Business – Percepatan dan Kemudahan Perizinan melalui sistem online;
- 4) Penguatan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan PAD;
- 5) Inventarisasi/Sensus & Pemanfaatan Aset Daerah;
- 6) Peningkatan Fungsi dan Peran BUMD dalam Perekonomian Daerah;
- 7) Penguatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan;
- 8) Pengendalian Inflasi Daerah, Perluasan Akses Keuangan Daerah, Perluasan Elektronifikasi-Digitalisasi Daerah;
- 9) Pengembangan JakPreneur;
- 10) Peningkatan Daya Saing UKM, IKM, dan Koperasi;
- 11) Optimalisasi Penataan Sarana dan Prasarana PKL; dan
- 12) Pemberian Dukungan ke UKM, IKM, dan Koperasi dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19.

h. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Implementasi pemanfaatan ruang dan penataan kawasan
- 2) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Kualitas Udara
- 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4) Koordinasi Pembangunan Infrastruktur
- 5) Pengendalian Kewajiban Fasos Fasum SIPPT
- 6) Pengembangan Sanitasi Lingkungan

i. Biro Kesejahteraan Sosial

- 1) Pembangunan Stadion Olahraga bertaraf internasional
- 2) Peningkatan kesejahteraan lansia melalui kartu lansia Jakarta (KLJ)
- 3) Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial
- 4) Peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas
- 5) Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 6) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan integratif

j. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

- 1) Penguatan peran tokoh agama dalam pembangunan mental spiritual
- 2) Peran Rumah Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual untuk pemberdayaan umat
- 3) Pengintegrasian Pendidikan ke dalam kebudayaan dalam rangka membangun peradaban, pengembangan karakter generasi muda yang berbudaya
- 4) Penguatan pelayanan masyarakat bidang mental spiritual berbasis digital
- 5) Penguatan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel IV.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29.12	36.9	37.8	39.15	40.73	40.73
		1 Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,3	4.047	4.128	4,211	4.295	4.295
		2 Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
		3 Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95
		4 Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasi Sekretariat Daerah	1 Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2 Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100
		5 Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1 Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70
			2 Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Sekretariat Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam tabel yang berisikan dari program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran sekretariat daerah. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun 2023-2026 dituangangkan dalam table berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN 1 RPD :	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD:	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1. Fasilitasi Kerjasama Daerah Melalui Fasilitasi Sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri, serta Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Penyelesaian masalah (setiap issue kecil yang berkembang dari sebuah issue besar yang tersaji-apa adanya dari sumber/lapangan) Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		2. Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	1. Peningkatan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
		3. Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	1. Peningkatan Pengelolaan, fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Keuangan

TUJUAN 1 RPD :	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD:	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial 2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk
		5. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 2. Peningkatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan, serta Perpustakaan dan Kearsipan. 3. Fasilitasi Pelayanan Bidang Mental Spiritual
	2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Deregulasi /Penataan produk hukum daerah dalam bentuk harmonisasi dan evaluasi 2. Meningkatkan nilai komponen penataan peraturan perundang-undangan dalam indeks Reformasi Birokrasi
	3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis

TUJUAN 1 RPD :	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
SASARAN 1 RPD:	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian kewenangan dilakukan secara proposional sesuai dengan tugas dan fungsinya
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah dengan Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
	5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian solusi dalam permasalahan yang ada pada Fasilitasi Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah 2. Evaluasi Pelaksanaan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program/ kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 5 (lima) tahunan semenjak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dijabarkan kedalam matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdiri dari 8 Program dan 24 Kegiatan.

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026

1. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Kerja Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

2. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan

4. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerja Sama Daerah

5. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

6. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian

7. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

8. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

- Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.4	MENGUATNYA NILAI-NILAI DEMOKRASI, KEBANGSAAN, DAN KEBHINEKAAN MASYARAKAT																
1	PENGUATAN KAPASITAS LEGISLATIF DALAM MENERUSKAN ASPIRASI MASYARAKAT	NILAI INDIKATOR KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI PADA INDEKS DEMOKRASI	%	29,63	30	721.774.299.926	30	783.215.250.173	30	822.112.092.655	30	845.646.961.020	30	3.172.748.603.774			
1.2	PENINGKATAN EFEKTIVITAS LAYANAN DAN FASILITASI LEMBAGA LEGISLATIF	NILAI INDIKATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM ASPEK KESETARAAN PADA INDEKS DEMOKRASI	Persentase	50,94	56,6	721.774.299.926	61,32	783.215.250.173	61,32	822.112.092.655	63,73	845.646.961.020	63,73	3.172.748.603.774			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	313.513.994.206	4	313.608.374.174	4	317.361.867.805	4	320.499.253.180	4	1.264.983.489.365	BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	0	100	337.379.850	100	338.805.649	100	340.245.705	100	341.700.162	100	1.358.131.366	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	216.969.750	11	217.191.448	11	217.415.362	11	217.641.516	44	869.218.076	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	120.410.100	3	121.614.201	3	122.830.343	3	124.058.646	12	488.913.290	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	4	4	38.785.365.972	4	38.786.310.752	4	38.787.264.979	4	38.788.228.749	4	155.147.170.452	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	117	117	38.128.887.974	117	38.128.887.974	117	38.128.887.974	117	38.128.887.974	117	152.515.551.896	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3	215.339.278	3	215.532.671	3	215.727.997	3	215.925.277	12	862.525.223	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	4	441.138.720	4	441.890.107	4	442.649.008	4	443.415.498	16	1.769.093.333	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.03.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks	4	4	117.000.000	4	117.000.000	4	117.000.000	4	117.000.000	4	468.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	2	117.000.000	2	117.000.000	2	117.000.000	2	117.000.000	8	468.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	4	4	1.275.870.200	4	1.288.628.902	4	1.301.515.191	4	1.314.530.343	4	5.180.544.636	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	1.275.870.200	1	1.288.628.902	1	1.301.515.191	1	1.314.530.343	4	5.180.544.636	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	4	4	30.789.552.711	4	34.273.799.019	4	35.652.115.002	4	36.192.624.145	4	136.908.090.877	BAGIAN UMUM BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	207.561.675	1	209.637.292	1	211.733.665	1	213.851.001	4	842.783.633	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	12.371.233.496	1	14.681.159.706	1	14.884.512.391	1	15.049.408.603	4	56.986.314.196	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1	2.459.414.164	1	2.484.008.306	1	2.508.848.389	1	2.533.936.873	4	9.986.207.732	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	660.491.570	1	770.491.570	1	880.491.570	1	890.491.570	4	3.201.966.280	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	1	2.777.223.350	1	2.804.995.583	1	2.833.045.539	1	2.861.375.995	4	11.276.640.467	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	13	13	59.224.490	13	59.816.735	13	60.414.902	13	61.019.051	52	240.475.178	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	586.052.500	1	591.913.025	1	597.832.155	1	603.810.477	4	2.379.608.157	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	342.533.546	2	345.958.882	2	349.418.471	2	352.912.655	8	1.390.823.554	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	11.225.817.920	12	12.225.817.920	12	13.225.817.920	12	13.525.817.920	48	50.203.271.680	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran Yang Efisien	Indeks	4	4	8.091.210.540	4	2.254.108.770	4	2.083.108.770	4	2.206.108.770	4	14.634.536.850	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	980.000.000	1	1.500.000.000	1	1.378.000.000	1	1.500.000.000	4	5.358.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	48	4.911.210.540	30	54.108.770	25	55.108.770	25	56.108.770	128	5.076.536.850	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	2.000.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	8	3.500.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	30	200.000.000	30	200.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	700.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	33.731.124.630	4	34.058.335.876	4	34.398.919.234	4	34.742.908.427	4	136.931.288.167	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	340.533.648	12	343.938.984	12	347.378.374	12	350.852.158	48	1.382.703.164	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	6.043.725.167	12	6.104.162.419	12	6.165.204.043	12	6.226.856.083	48	24.539.947.712	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.268.372.807	12	2.280.956.535	12	2.303.766.100	12	2.326.803.761	48	9.179.899.203	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	25.078.493.008	12	25.329.277.938	12	25.582.570.717	12	25.838.396.425	48	101.828.738.088	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	15.523.304.838	4	15.676.567.887	4	15.896.733.431	4	16.022.337.437	4	63.118.943.593	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	41	851.797.981	41	860.315.961	41	868.919.121	41	877.608.312	41	3.458.641.375	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	66	197.000.000	66	197.000.000	66	197.000.000	66	197.000.000	66	788.000.000	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	771	771	522.470.992	771	527.695.702	771	532.972.659	771	538.302.386	771	2.121.441.739	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	6.408.182.070	3	6.472.263.891	3	6.602.356.395	3	6.636.986.630	3	26.119.788.986	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	50	167.039.406	50	168.709.800	50	170.396.898	50	172.100.867	50	678.246.971	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	622	622	7.376.814.389	622	7.450.582.533	622	7.525.088.358	622	7.600.339.242	622	29.952.824.522	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan	Indeks	0	4	1.200.000.000	4	1.315.000.000	4	1.430.150.000	4	1.545.451.500	4	5.490.601.500	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	16	16	1.200.000.000	16	1.315.000.000	16	1.430.150.000	16	1.545.451.500	64	5.490.601.500	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks	4	4	182.824.744.384	4	184.652.991.827	4	186.499.521.746	4	188.364.516.963	4	742.341.774.920	BAGIAN KEUANGAN BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	106	106	179.832.054.368	106	181.630.374.911	106	183.446.678.661	106	185.281.145.447	106	730.190.253.387	BAGIAN KEUANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.01.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	1	1.764.112.016	1	1.781.753.136	1	1.799.570.667	1	1.817.566.374	4	7.163.002.193	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	25	106	1.228.578.000	106	1.240.863.780	106	1.253.272.418	106	1.265.805.142	424	4.988.519.340	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	Indeks	4	4	838.441.081	4	846.825.492	4	855.293.747	4	863.846.684	4	3.404.407.004	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.01.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	0	1	838.441.081	1	846.825.492	1	855.293.747	1	863.846.684	4	3.404.407.004	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	4	408.260.305.720	4	469.606.875.999	4	504.750.224.850	4	525.147.707.840	4	1.907.765.114.409	BAGIAN UMUM BAGIAN PERSIDANGAN BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Nilai	4	4	5.008.198.337	4	5.229.760.320	4	5.403.796.323	4	5.152.311.087	4	20.794.066.067	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
		Jumlah Laporan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Laporan	0	1		1		1		1		4					
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	16.000.000	1	16.160.000	1	16.320.000	1	16.480.000	4	64.960.000	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	1	1	4.740.198.337	1	4.787.600.320	1	4.835.476.323	1	4.883.831.087	4	19.247.106.067	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	0	2	252.000.000	1	126.000.000	2	252.000.000	2	252.000.000	7	882.000.000	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	2	600.000.000	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kebijakan Anggaran	Nilai	4	4	13.212.058.623	4	13.344.179.209	4	13.477.621.002	4	13.612.397.211	4	53.646.256.045	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	1	1		1		1		1		4				BAGIAN PERSIDANGAN	
4.02.02.1. 02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	43.329.000	1	43.762.290	1	44.199.913	1	44.641.912	4	175.933.115		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	43.329.000	1	43.762.290	1	44.199.913	1	44.641.912	4	175.933.115		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	13	13	13.021.774.623	13	13.151.992.369	13	13.283.512.293	13	13.416.347.416	52	52.873.626.701		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	1	60.297.000	1	60.899.970	1	61.508.970	1	62.124.059	4	244.829.999		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	2	2	43.329.000	2	43.762.290	2	44.199.913	2	44.641.912	8	175.933.115		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	4	4	24.478.569.513	4	24.723.355.211	4	24.970.588.761	4	25.220.294.649	4	99.392.808.134		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	0	1		1		1		1		4				BAGIAN PERSIDANGAN	
4.02.02.1. 03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	24	24	5.051.231.933	24	5.101.744.253	24	5.152.761.695	24	5.204.289.312	96	20.510.027.193		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	24	24	5.051.231.933	24	5.101.744.253	24	5.152.761.695	24	5.204.289.312	96	20.510.027.193	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	24	24	5.051.231.933	24	5.101.744.253	24	5.152.761.695	24	5.204.289.312	96	20.510.027.193	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	24	24	5.051.231.933	24	5.101.744.253	24	5.152.761.695	24	5.204.289.312	96	20.510.027.193	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	24	24	4.273.641.781	24	4.316.378.199	24	4.359.541.981	24	4.403.137.401	96	17.352.699.362	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai	4	4	174.059.651.334	4	232.754.776.480	4	265.395.572.879	4	283.566.057.440	4	955.776.058.133	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	1	1		1		1		1		4		BAGIAN PERSIDANGAN			
															BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
															BAGIAN UMUM			
															BAGIAN PERSIDANGAN			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
4.02.02.1. 04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0	0	0	1	2.528.000.000	0	0	0	0	1	2.528.000.000	BAGIAN UMUM	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	12.766.687.042	6	12.894.353.912	6	13.023.297.452	6	13.153.530.426	24	51.837.868.832	BAGIAN UMUM	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	35	35	107.415.776.212	35	157.415.776.212	35	187.415.776.212	35	200.415.776.212	140	652.663.104.848	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	30	30	3.002.699.700	30	3.032.726.697	30	3.063.053.964	30	3.093.684.504	30	12.192.164.865	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9	9	943.127.900	9	952.559.179	9	962.084.771	9	971.705.818	9	3.829.477.668	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	0	12	49.731.360.480	12	55.731.360.480	12	60.731.360.480	12	65.731.360.480	48	231.925.441.920	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	BAGIAN PERSIDANGAN	BAGIAN JAKARTA	DKI JAKARTA	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai Kepuasan Terhadap Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai	4	4	165.901.789.981	4	167.610.807.880	4	169.336.915.959	4	171.080.285.119	4	673.929.798.939	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
		Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	1	1		1		1		1		4					
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12	67.880.007.119	12	68.608.807.190	12	69.344.895.262	12	70.088.344.215	48	275.922.053.786	BAGIAN UMUM	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	106	106	98.021.782.862	106	99.002.000.690	106	99.992.020.697	106	100.991.940.904	424	398.007.745.153	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai	4	4	2.372.824.651	4	2.420.518.427	4	2.444.723.611	4	2.596.552.898	4	9.834.619.587	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1		1		1		1		4					
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	12	2.372.824.651	12	2.420.518.427	12	2.444.723.611	12	2.596.552.898	48	9.834.619.587	BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA		
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pembahasan Kerja Sama Daerah	Nilai	4	4	93.840.000	4	113.840.000	4	133.840.000	4	153.840.000	4	495.360.000	BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Progra m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja dan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Kerjasama yang terfasilitasi	Persentase	0	100		100		100		100		100		100		BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
4.02.02.1. 07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	0	1	50.940.000	1	60.940.000	1	70.940.000	1	80.940.000	4	263.760.000		BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA	
4.02.02.1. 07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	0	1	42.900.000	1	52.900.000	1	62.900.000	1	72.900.000	4	231.600.000		BAGIAN PERUNDANG UNDANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	DKI JAKARTA	
4.02.02.2. 08	Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai	4	4	23.133.373.281	4	23.409.638.472	4	23.587.166.315	4	23.765.969.436	4	93.896.147.504		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan	0	1		1		1		1		4			BAGIAN PERSIDANGAN		
4.02.02.2. 08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4	4	300.000.000	4	350.000.000	4	300.000.000	4	250.000.000	16	1.200.000.000		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.2. 08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	24	10.206.854.176	24	10.306.854.176	24	10.406.854.176	24	10.506.854.176	96	41.427.416.704		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.2. 08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1	3.229.923.305	1	3.262.222.538	1	3.294.844.763	1	3.327.793.211	4	13.114.783.817		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	
4.02.02.2. 08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	4	4	9.396.595.800	4	9.490.561.758	5	9.585.467.376	5	9.681.322.049	18	38.153.946.983		BAGIAN PERSIDANGAN	DKI JAKARTA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yang ditampilkan tabel dalam lampiran VII dalam buku ini.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah			Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29.12	36.9	37.8	39.15	40.73	40.73	
		1 Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan		Skor EKPPD	3,3	4.047	4.128	4,211	4.295	4.295	
			Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1 Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang Terimplementasi	0	50	50	50	60	60	
				2 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan Perjalanan Dinas	0	4	4	4	4	4	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
				3 Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90	91	92	93	94	94	
			Program Kesejahteraan Rakyat	1 Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial	4	4	4	4	4	4	
				2 Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	4	4	4	4	4	4	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	1 Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100	100	
			Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1 Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan	100	100	100	100	100	100	
				2 Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	80	80	80	80	80	80	
				3 Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	30	30	35	40	45	45	
		2 Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
			Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1 Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100	100	90	80	70	70	
				2 Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	
				3 Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	
				4 Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	98	91	92	93	94	94	
	3 Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis			Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95	
			Program Penataan Organisasi	1 Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan	7,03	7,16	7,2	7,24	7,28	7,28	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
				Penguatan Organisasi							
				2 Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	11,83	12,11	12,12	12,13	12,14	12,14	
				3 Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen Perubahan	4,82	4,83	4,85	4,86	4,9	4,9	
	4	Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasi an Sekretariat Daerah		1 Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
				2 Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	4	4	4	4	4	
				2 Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan	4	4	4	4	4	4	
				3 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan Komunikasi Pimpinan Daerah	4	4	4	4	4	4	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
		5 Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah		1 Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70	
				2 Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70	
			Program Penataan Organisasi	1 Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi	0	50	50	60	60	60	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.